

PENDAMPINGAN PERSIAPAN MENUJU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KUTA II BADUNG-BALI

^{1*}I Putu Dedy Kastama Hardy, ² Ni Luh Gde Ari Natalia Yudha

^{1,2} Fakultas Kesehatan Sains dan Teknologi, Universitas Dhyana Pura, Badung,
Bali, Indonesia

*Email: dedykastama@gmail.com

ABSTRAK

UPT Puskesmas Kuta II sebagai unit pelaksana teknis daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, sebagai garda terdepan layanan kesehatan tingkat dasar, maka menjadi suatu keharusan bagi Puskesmas untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan salah satunya melalui program menjadikan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu: belum ada pemahaman yang sama bagi petugas puskesmas tentang pentingnya BLUD seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa dengan menjadikan Puskesmas sebagai BLUD, maka banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam fleksibilitas pengelolaan keuangan Puskesmas sehingga dapat menjalankan pelayanan dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas. Metode pendekatan yang ditawarkan pelatihan dalam persiapan pelaksanaan BLUD di puskesmas dilaksanakan selama 2 hari dengan memberikan materi dan pendampingan tentang: 1) dasar ketentuan dan tujuan penerapan BLUD; 2) mekanisme penilaian syarat administratif BLUD sesuai Permendagri 61/2007 dan SE Mendagri No 900/2759/SJ; 3) gambaran umum penyusunan dokumen standar pelayanan minimal. 4) gambaran umum penyusunan dokumen pola tata Kelola; 5) gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Strategis Bisnis dan hubungan dengan Standar Pelayanan Minimal; 6) gambaran umum penyusunan dokumen laporan keuangan pokok; 7) simulasi penilaian dokumen persyaratan administrasi BLUD. Hasil kegiatan terjadinya peningkatan pengetahuan sebesar 90%, terjadi peningkatan pengetahuan materi BLUD nilai rata-ratanya adalah 53% (*pretest*) menjadi 90% (*posttest*) dan dengan materi RKA dan laporan keuangan dengan nilai rata-ratanya adalah 60% (*pretest*) menjadi 90% (*posttest*). Kesimpulan dalam pengabdian ini yaitu terjadi peningkatan yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Kata kunci : Puskesmas, penetapan BLUD, syarat BLUD

ABSTRACT

UPT Puskesmas Kuta II as a regional implementing unit has the authority and responsibility for the maintenance of community health in its working area. Therefore, as the frontline in basic health services, it becomes a necessity for the Community Health Center (Puskesmas) to improve the health service system, one of which is through the program to make Puskesmas as a BLUD. The problems faced by the partners were: the lack of similar understanding for Puskesmas staff about the importance of BLUDs as previously described, that by making Puskesmas a BLUD, there are many benefits, especially in the flexibility of puskesmas financial management so that it can run services by prioritizing efficiency and productivity. The team offered training approaches in preparation for the implementation of BLUD at the Puskesmas, which was carried out for two days by providing material and assistance on: 1) basic Provisions and Objectives of BLUD Application / SJ; 2) overview of Preparation of Minimum Service Standard Documents; 3) general overview of Preparation of Governance Pattern Documents; 4) general overview of Preparation of Business Strategic Plan Documents and relationships with Minimum Service Standards; 5) general overview of Preparation of Basic Financial Statements; and 6) simulation of BLUD Administrative Requirement Document

Evaluation. The results of the activity included an increase in knowledge by 90%, an increase in knowledge of BLUD material the average value was 53% (pretest) to 90% (posttest) and with RKA material and financial statements with an average value of 60% (pretest) to 90% (posttest). The conclusion in this service had a significant increase before and after community service activities.

Key words: Puskesmas, BLUD determination, BLUD requirements

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka UPT Puskesmas Kuta II sebagai pos pelayanan kesehatan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pusat kesehatan, membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan.

UPT Puskesmas Kuta II Berdiri sejak 1 Juli 2004 sejak berada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang mewilayahi Dua (2) Kelurahan yaitu Kelurahan Legian, dan Kelurahan Seminyak. Luas wilayah UPT Puskesmas Kuta II adalah 5,67 km² dengan ketinggian kurang dari 500 mt di atas permukaan laut. Sedangkan jarak dari ibukota kecamatan adalah: Kelurahan Legian: 0 km, dan Kelurahan Seminyak: 2.5 km. Untuk kondisi topografi kedua kelurahan yaitu dengan bentuk permukaan tanah daratan yang merupakan daerah pantai dengan rata-rata tinggi curah hujan adalah 2.000-3.000 mm

Pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas merubah statusnya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan menjadi BLUD, Puskesmas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas tanpa mengutamakan keuntungan. Prinsip efisien dan produktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjalankan operasional bisnis BLUD. Aktivitas layanan BLUD diselenggarakan menyerupai entitas bisnis yang tidak akan terlepas dalam pencapaian produktivitas yang tinggi dan efisien. Berbeda dengan instansi pemerintah yang menjalankan aktivitas pemerintahan ala birokrasi murni, BLUD dituntut untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas yang diberikan (Suwarsi, 2018).

Anggaran belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran atau dengan kata lain, belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang proporsional. Fleksibilitas pada BLUD dengan status penuh dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek, diantaranya adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diharapkan bisa cepat menyesuaikan kebutuhan pengeluaran sebagai akibat tuntutan layanan dari masyarakat (*quick response*). BLUD diberikan kewenangan untuk menggunakan penghematan atau sisa anggaran tahun lalu untuk digunakan atau dibelanjakan pada tahun berikutnya. Yang tak kalah menariknya adalah BLUD diperkenankan memberikan remunerasi bagi pegawainya sepanjang pendapatan BLUD memungkinkan. Sebagai instansi pemerintah yang mengelola secara mandiri pendapatannya, BLUD juga diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan dan pengadaan aset. Tujuan diberikan fleksibilitas ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja aset yang dimiliki dan memberikan insentif untuk mengelola aset dengan lebih baik dan akuntabel.

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, sebagai garda terdepan layanan kesehatan tingkat dasar, maka menjadi suatu keharusan bagi Puskesmas untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan salah satunya melalui program menjadikan Puskesmas sebagai BLUD.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu: Belum ada pemahaman yang sama bagi petugas puskesmas tentang pentingnya BLUD seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa dengan menjadikan Puskesmas sebagai BLUD, maka banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam fleksibilitas pengelolaan keuangan Puskesmas sehingga dapat menjalankan pelayanan dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas. Sehingga dirasa bahwa diperlukan suatu pelatihan bagi staf puskesmas untuk mempersiapkan sistem pelayanan menjadi BLUD. Puskesmas Kuta II merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Badung yang belum berstatus BLUD padahal sudah menjadi rencana pemerintah untuk mengubah status puskesmas menjadi BLUD namun dalam proses tersebut belum adanya pendampingan dari Dinas Kesehatan kabupaten Badung.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Permasalahan yang dihadapi oleh puskesmas adalah belum memahami cara menyusun laporan keuangan dan pembuatan perencanaan yang berbasis bisnis plan.

Tabel. 1 Solusi dan target

No	Uraian	Target	Keterangan
1	Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk BLUD	Puskesmas mampu melakukan penyusunan RBA untuk BLU	100% staf paham Penyusunan RBA untuk BLU

2	Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan	Puskesmas mampu melakukan penyusunan SOP keuangan	100% staf paham penyusunan SOP keuangan
3	Pelatihan Penyusunan laporan keuangan BLUD	Puskesmas mampu melakukan penyusunan laporan keuangan BLU	100% staf paham penyusunan laporan keuangan BLU

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang ditawarkan

Pelatihan dalam persiapan pelaksanaan BLUD di puskesmas dilaksanakan selama 2 hari dengan memberikan materi dan pendampingan tentang:

- Dasar ketentuan dan tujuan penerapan BLUD
- Mekanisme penilaian syarat administratif BLUD Sesuai Permendagri 61/2007 dan SE Mendagri No 900/2759/SJ
- Gambaran umum penyusunan dokumen standar pelayanan minimal
- Gambaran umum penyusunan dokumen pola tata kelola
- Gambaran umum penyusunan dokumen rencana strategis bisnis dan hubungan dengan standar pelayanan minimal
- Gambaran umum penyusunan dokumen laporan keuangan pokok
- Simulasi penilaian dokumen persyaratan administrasi BLUD

Rencana Kegiatan

Program pengabdian berupa pelatihan yang dilakukan selama dua hari yaitu bulan Mei 2019. Hari pertama dilakukan pemberian materi oleh narasumber dengan metode ceramah dan diskusi. Narasumber berasal dari Universitas Dhyana Pura berjumlah 3 orang Pada hari kedua dilanjutkan dengan latihan dan simulasi penyusunan RBA, SOP dan Laporan Keuangan. Petugas Puskesmas yang

akan dilibatkan seluruh staf di Puskesmas Kuta II

Rancangan Evaluasi

Evaluasi yang akan dilakukan dengan memberikan *pretest* dan *posttest* pada setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan tahap 1 survei *Pretest*

Hasil penilaian pada saat *pretest* kepada pegawai di Puskesmas Kuta II didapatkan hasil *pretest* pelatihan dengan materi BLUD dari 18 soal yang diikuti oleh 26 peserta mempunyai nilai rata-rata 13,81 jika dipersenkan menjadi 53%. Nilai yang sering muncul dari 18 soal yang diberikan adalah 15 dan nilai tengah dari skor personal adalah 14. Hasil *pre-test* pelatihan dengan penyusunan RKA dan laporan keuangan dari 18 soal yang diikuti oleh 26 peserta mempunyai nilai rata-rata 15,58 jika dipersenkan menjadi 60%. Nilai yang sering muncul dari 18 soal yang diberikan adalah 17 dan nilai tengah dari skor persoal adalah 16.



Gambar 1. *Pretest* sebelum memulai pendampingan dan pelatihan

Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk BLUD Puskesmas

Pendampingan penyusunan rencana bisnis anggaran yang sesuai dengan rencana

strategis dinas Kesehatan dan rencana strategis Puskesmas.

Rencana Bisnis & Anggaran, atau yang biasa disebut juga dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU. Tujuan penyajian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk memberi informasi mengenai:

- Lingkup bisnis dari BLU yang tercermin dalam gambaran umum BLU.
- Kinerja tahun berjalan BLU yang terdiri atas kinerja keuangan dan kinerja non keuangan Puskesmas
- Rencana pendapatan dan biaya tahun yang dianggarkan.

Penggunaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) meliputi:

1. Manajemen BLU
Manajemen BLU berkepentingan atas informasi RBA untuk mengontrol realisasi anggaran dan pencapaian kinerja BLU.
2. Kementerian / Lembaga (K/L)
Kementerian/Lembaga berkepentingan atas informasi RBA sebagai dasar pengambilan keputusan pengesahan program, kegiatan, dan anggaran yang tertuang dalam RBA.



Gambar 2. Pendampingan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran(RBA)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Untuk BLUD

Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan untuk persyaratan pelaporan Badan Layanan Umum Daerah. Peran Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memungkinkan untuk memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluarannya. Setelah menjadi BLUD (PPK-BLUD), memungkinkan Puskesmas untuk menggunakan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Namun sebagai konsekuensi dari bentuk BLUD, pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk pelaporan menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi.

Sebagai PPK-BLUD, Puskesmas harus menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual. Laporan keuangan yang harus disajikan adalah: 1) Neraca, 2) Laporan Operasional (LO), dan 3) Laporan Arus Kas (LAK). Implementasi proses akuntansi (jurnal hingga laporan) tentunya haruslah tetap konsisten, sehingga laporan yang dihasilkan benar-benar "auditable". Sebagai SKPD, Puskesmas juga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, seperti; 1) Neraca, 2) Laporan Operasional (LO), 3) Laporan Arus Kas (LAK), dan 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Realisasi Anggaran (LRA).



Gambar 3. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Posttest

Hasil skor *pretest* dan *posttest* dari 26 peserta pelatihan, pada materi BLUD nilai rata-ratanya adalah 53% (*pretest*) dan 90% (*posttest*) dan dengan materi RKA dan laporan keuangan dengan nilai rata-ratanya adalah 60% (*pretest*) dan 90% (*posttest*). Hal ini disebabkan karena peserta pelatihan pada saat *posttest* lebih siap daripada *pretest*. Jadi sudah dipastikan bahwa kesiapan peserta saat pelatihan akan berpengaruh terhadap nilai yang akan diperoleh

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan pemaparan seluruh kegiatan terjadinya peningkatan pengetahuan sebesar 90%, terjadi peningkatan pengetahuan materi BLUD nilai rata-ratanya adalah 53% (*pretest*) menjadi 90% (*posttest*) dan dengan materi RKA dan laporan keuangan dengan nilai rata-ratanya adalah 60% (*pretest*) menjadi 90% (*posttest*). Kesimpulan dalam pengabdian ini yaitu terjadi peningkatan yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diantaranya: 1) Universitas Dhyana Pura Bali dan Lembaga Pengabdian dan Penelitian Universitas Dhyana Pura yang telah memberikan dana serta memberikan kesempatan kepada tim pengabdian untuk melaksanakan pengabdian di Puskesmas Kuta II; 2) Puskesmas Kuta II yang sudah bersedia menjadi mitra dalam pengabdian ini; serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Suwarsi, Y. (2018). Analisis Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (Kasus Dua Puskesmas di Kabupaten Banjar) 1. *Focus*, 8